

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *ELECTRONIC GOVERNMENT* “SIAPKERJA” PADA
UPT BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN TAKALAR**



Oleh:

AKBAR MAULANA

105611102419

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022/2023

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *ELECTRONIC GOVERNMENT* “SIAPKERJA” PADA
UPT BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN TAKALAR**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar

Sarjana Administrasi Publik (S. AP)

Disusun Dan Diajukan Oleh :

AKBAR MAULANA

Nomor Stambuk : 105611102419

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023


HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi *Electronic Government* "SIAPkerja" pada
UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar
Nama Mahasiswa : Akbar Maulana
Nomor Induk Mahasiswa : 1056111024219
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:
Pembimbing I Pembimbing II
 
Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si Hardianto Hawing, S. T, M. A
Mengetahui:
Dekan Ketua Program Studi



Dr. Hj. Thyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Nur Wahid., S.Sos., M.Si.
NBM: 991 742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0174/FSP/A.4-II/VIII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris

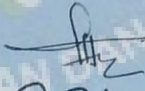

Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si

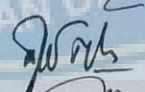
NBM: 730727

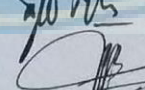

Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

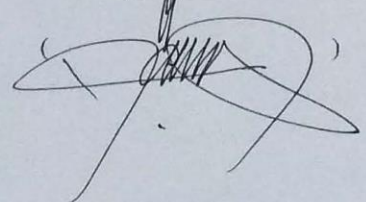
NBM: 992797

Tim Penguji:

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si ()

2. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si ()

3. Wardah, S.Sos., M.A ()

4. Hardianto Hawing, S.T., M.A ()

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi *Electonic Government* “SIAPkerja” Pada UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua Bapak Supriadi Dg Ngerang dan Ibu Kamasiah Dg Ngambong serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun material, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan penulis dapat menjadi seorang sarjana.
2. Bapak Dr. Hafiz Elfiansya parawu, M.Si, selaku Pembimbing I dan bapak Hardianto Hawing, ST, M.Si .Silaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. H Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Bapak Dr. Nur Wahid,S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Teman-teman yang telah membantu dan memberikan semangat selama pembuatan skripsi dan tidak sempat saya sebutkan satu-persatu

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 21 Juli 2023



Akbar Maulana

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Akbar Maulana

Nomor Induk Mahasiswa : 105611102419

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 21 Juli 2023

Yang Menyatakan



Akbar Maulana

ABSTRAK

AKBAR MAULANA, 2023 IMPLEMENTASI *ELECTRONIC GOVERNMENT* "SIAPkerja" PADA BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN TAKALAR (Dibimbing oleh Hafiz Elfiansya parawu dan Hardianto Hawing)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi *Electronic Government* "Siapkerja" pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar, terhadap kebutuhan dalam melakukan pelayanan public, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi *Electronic Government* melalui aplikasi SIAPkerja pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan 3 elemen sukses dalam mengukur tingkat kesuksesan implementasi *Electronic Government* di Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar dengan menggunakan teori Indrajit, yaitu : 1. Elemen *Support* (dukungan) dinilai sudah baik karena dilihat dari sisi dukungan dari pemerintah melalui kebijakan yang dibuat dalam proses penerapan aplikasi "SIAPkerja" pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar; 2. Elemen *Capacity* (sumber daya) dinilai cukup baik dengan ketersediaan SDM, yaitu oprator yang sudah dibekali dengan ilmu dari BLK Kabupaten Takalar; 3. Elemen *Value* (manfaat) dinilai sudah cukup baik karena Masyarakat tidak harus datang lagi ke kantor dalam penyelesaian data dan itu tentunya akan mengemat mulai dari waktu, tenaga dan biaya. Faktor penghambat dalam Implementasi *Electronic Government* "SIAPkerja" Pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar yaitu : jaringan tidak stabil, masyarakat kurang memahami teknologi.

Kata Kunci : Implementasi, *Electronic Government*, Pelayanan Publik

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | vi |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Konsep dan Teori..... | 16 |
| C. Kerangka Pikir | 31 |
| D. Fokus Penelitian | 32 |
| E. Deskriptif Fokus..... | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 36 |
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian | 36 |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian..... | 36 |
| C. Informan Penelitian..... | 37 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 39 |
| F. Keabsahan Data..... | 40 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 42 |
| A. Gambaran Umum UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar | 42 |
| B. Hasil Penelitian | 52 |
| 1. Implmentasi <i>Electronic Government</i> “SIAPkerja” pada UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar..... | 52 |
| a. <i>Support</i> (Dukungan)..... | 52 |

| | |
|--|-----------|
| b. <i>Capacity</i> (Kapasitas) | 55 |
| c. <i>Value</i> (Manfaat) | 58 |
| 2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi <i>Electronic Government</i> pada UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar | 60 |
| C. Pembahasan Hasil Penelitian | 62 |
| 2. Implmentasi <i>Elektronik Government</i> “SIAPkerja” pada UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar..... | 62 |
| a. <i>Support</i> (dukungan)..... | 62 |
| b. <i>Capacity</i> (kapasitas) | 64 |
| c. <i>Value</i> (manfaat)..... | 67 |
| 3. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi <i>Electronic Government</i> pada UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar | 69 |
| 1.) Jaringan Tidak Stabil..... | 69 |
| 2.) Masyarakat Kurang Memahami Teknologi..... | 70 |
| BAB V PENUTUP | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 73 |
| LAMPIRAN | 76 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era sekarang ini sudah memasuki era globalisasi, dimana era ini mengharapkan terwujudnya efisien dan efektif di berbagai negara di dunia saat ini. Kemajuan infomatika, komunikasi dan teknologi menuntut perubahan pada pola dan cara dilaksanakannya kegiatan di segala sektor, baik itu sector industri, perdagangan, dan terutama dalam sector pemerintahan. Keterlibatan secara aktif dalam revolusi informasi, komunikasi dan teknologi akan menentukan masa depan dan kesejahteraan bangsa.

Penggunaan informasi, komunikasi dan teknologi (*Information, Communication and Technology/ICT*) telah berkembang luas, dimana tidak terbatas pada bidang-bidang industri dan perdagangan saja, namun juga bidang-bidang lainnya pertahanan, keamanan, pendidikan, sosial, tenaga kerja dan sebagainya. Penggunaan *ICT* sangat menguntungkan apabila dibandingkan dengan sistem manual dan cara tradisional. Sehingga hampir seluruh negara di dunia telah menggunakan informasi, komunikasi, dan teknologi dalam melaksanakan berbagai sistem di Negeranya, terutama yang terkait dengan sistem pemerintahan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menggunakan internet dalam menyampaikan Informasi serta pelayanan dari pemerintah

kepada masyarakat. Sehingga pola yang dahulu masih irasional dan tradisional sudah tergantikan, dimana yang sebelumnya segala sistem masih manual dan memerlukan waktu yang lama, serta proses yang panjang sudah diminimalisasi di Indonesia ini, Sekarang zaman serba cepat, perputaran waktu yang sangat singkat dan arus yang sangat canggih, pola pikir manusia telah semakin canggih. Hal ini telah terlihat beberapa tahun terakhir, dimana pelayanan pemerintah mengalami pertumbuhan yang pesat.

Kecanggihan teknologi telah diaplikasikan ke berbagai bidang sektor biang yang mendukung diterapkannya efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Upaya pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak lepas dari penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari segi konstitusi dan politik, pelayanan publik merupakan salah satu tujuan dibentuknya negara, yakni bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia, tujuan dari dibentuknya pemerintahan negara dan juga daerah di Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 diantaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan untuk keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah

ditetapkan (Pananrangi, et al. 2021). Pada hakikatnya pelayanan umum merupakan usaha untuk meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah mendorong untuk mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayan, dan mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan (Lestari and Santoso, 2022). Searah dengan pendapat sebelumnya, dalam Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang meliputi satuan kerja/satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Tertinggi dan tinggi Negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik yang merata keseluruh warga negara, sehingga dalam rangka melaksanakan kewajibannya itu, pemerintah berusaha memperbaiki pelayanannya, dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang mampu mengelola data dengan cepat, efektif dan efisien serta menghasilkan informasi yang tepat, cepat dan akurat. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah mengembangkan pelayanan berbasis elektronik (*E-government*).

E-Government merupakan sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan kemudahan akses informasi publik kepada masyarakat. Pelaksanaan *E-Government* dan peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien memerlukan kebijakan dan strategi pengembangan *E-Government* (Wirawan, 2020). Kebijakan dan strategi tersebut diatur dalam Inpres No.3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Pengembangan *E-Government* di Seluruh Jajaran Pemerintah. Menurut (Belai, 2022) pada Seminar Nasional Informatika yang berjudul Peran *E-Governmsent* dalam. Rangka Mewujudkan *E-Government* bagi Masyarakat, menyimpulkan bahwa Sosialisasi *E-Government* perlu dilakukan secara konsisten, kontinyu kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui manfaat yang akan diperoleh dengan *E-Government*.

Dalam bukunya Indrajit (2006), ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: *Support, Capacity, dan Value*.

1. *Support*

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-Government*. Tanpa adanya unsur “*political will*” ini, mustahil

berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *E-Government* dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “*top down*”.

2. *Capacity*

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *E-Government* terkait menjadi kenyataan.

3. *Value*

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*).

Berbagai inisiatif *E-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*).

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini adalah warga Negara. Agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan

penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Informasi yang terdapat dalam sistem pelayanan publik tidak terlepas dari E-government yang di kembangkan oleh pemerintah, salah satunya terdapat pada Balai Latihan Kerja. BLK ini merupakan salah satu Instansi mendukung PSDM (Pembangunan Sumber Daya Manusia), melakukan pelatihan sesuai dengan pada kebutuhan pasar kerja yang telah ditetapkan. Jika merujuk pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang mengamati tentang persoalan ketenagakerjaan dan penghidupan yang layak menjadi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sudah menjadi tugas bagi salah satu Kementerian yakni Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selanjutnya diberikan otonomi kepada dinas tenaga kerja setiap kabupaten yang menaungi salah satu lembaga yang bergerak dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang selanjutnya diberikan otonomi kepada dinas tenaga kerja disetiap Kabupaten telah membangun sebuah Balai Latihan Kerja disetiap Daerah di Indonesia yang mempunyai tujuan untuk memberikan keterampilan dan keahlian kepada peserta pelatihan demi meningkatkan kualitas calon tenaga kerja untuk mengisi lowongan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Mengimplementasikan Perban 7/2022, Kementerian Ketenagakerjaan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-

3/01/P02.01/III/2023 tentang penggunaan SIAPkerja dan Penerbitan ID calon Pekerja Migran Indonesia, yang direspon oleh Kepala BP2MI dengan surat nomor B.185/KA/PP.03.05//II/2023 tertanggal 16 Februari 2023 Perihal Pemberitahuan perubahan Penggunaan aplikasi Layanan Proses penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Balai Latihan Kerja merupakan tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Hampir diseluruh Indonesia instansi pemerintahan telah menggunakan *website*, *platform* ataupun Aplikasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Takalar merupakan salah satu instansi pemerintah yang menggunakan aplikasi dalam memberikan layanan yang nama aplikasinya adalah “SIAPkerja” atau Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan. Dengan adanya aplikasi ini masyarakat akan dimudahkan dalam menerima informasi ataupun layanan yang diberikan, karena bisa melihat informasi dari rumah, dimana sebelumnya Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar masih menggunakan media cetak misalnya pada proses penerimaan peserta didik baru masih menggunakan formulir fisik kepada masyarakat. Aplikasi “SIAPkerja” atau Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan.

Merupakan *platform* sistem pelayanan ketenagakerjaan berbasis online dalam menyingkapi tuntutan digitalisasi. Aplikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik dalam mengakses seluruh layanan yang disediakan.



Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi SIAPkerja

Balai Latihan Kerja sebagai tempat yang masuk kedalam kategori lembaga pelatihan hendaknya menyusun program dan sistem pelatihan sesuai dengan standar nasional, guna mengurangi salah satu penyebab dari penyebab dari tingginya angka pengangguran, yakni menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten serta mempunyai daya saing yang tinggi dalam bersaing di dunia kerja. BLK telah berkolaborasi dan bekerjasama dengan sejumlah instansi swasta maupun instansi negara lainnya. Balai Latihan Kerja kabupaten Takalar menyediakan 7 macam kejuruan diantaranya Teknik Otomotif, Listrik, Pengelasan, Menjahit, Komputer, Tata Kecantikan, dan Pendingin (teknisi AC). Setiap kejurumannya diikuti oleh 16 peserta pelatihan. Agar memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mengetahui informasi, dengan adanya pelayanan berbasis online, dalam hal ini adalah aplikasi “SIAPkerja”, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendaftar tanpa harus datang ke UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar karena lokasinya yang jauh dari pusat kota.

Penerapan program berbasis *online* ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam Hal ini adalah calon peserta pelatihan di UPT BLK Kabupaten Takalar, serta disediakan layanan yang baik, mudah dan efektif. Namun pada kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat Kabupaten Takalar yang masih belum mengetahui mekanisme dan alur kerja, serta sama sekali tidak mengetahui keberadaan program pelayanan elektronik ini. Selain itu,

kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat seringkali berjalan lambat, dikarenakan berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan masih kurang efektif dilihat dengan perkembangan UPT BLK Kabupaten Takalar yang telah menerapkan sistem berbasis online.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah ditemukan diatas, maka fokus rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana implmentasi *Electronic Government* “SIAPkerja” pada UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar?
2. Apa Saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi *Electronic Government* pada UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui implmentasi *Electronic Government* “SIAPkerja” pada UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar.
2. Mengetahui faktor penghambat dalam implementasi *Electronic Government* “SIAPkerja” pada UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

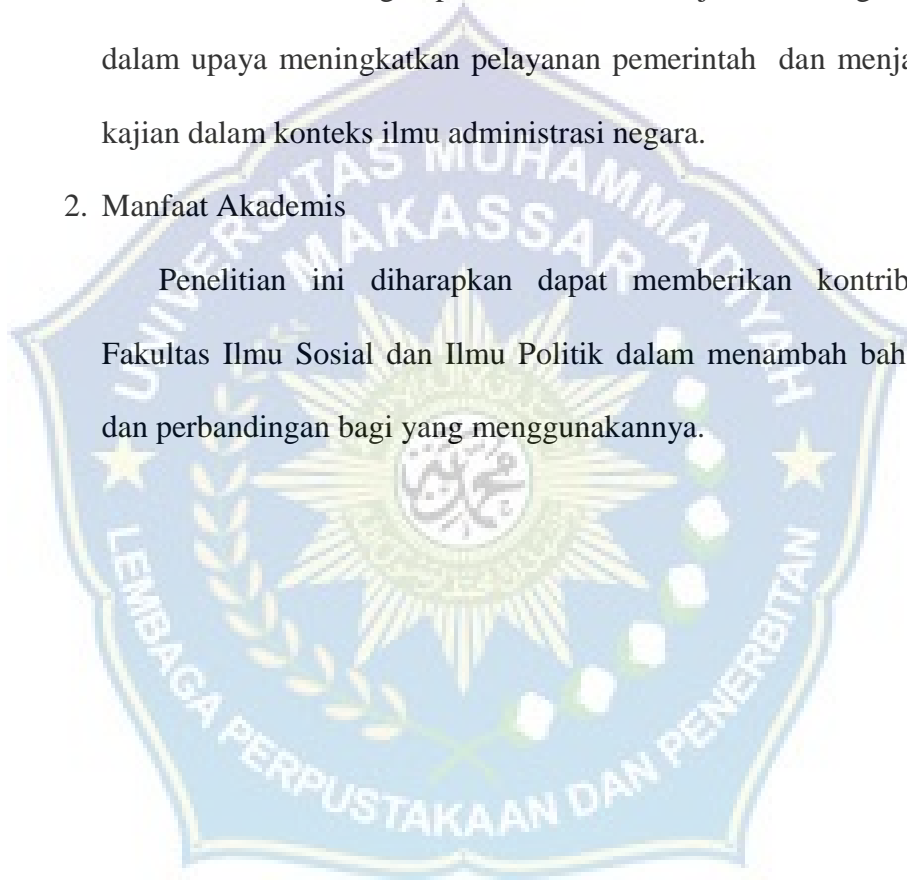
Adapun Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Manfaat teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran untuk dijadikan sbagai masukan dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintah dan menjadi bahan kajian dalam konteks ilmu administrasi negara.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menambah bahan kajian dan perbandingan bagi yang menggunakannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan sebagai perbandingan penelitian untuk tahap selanjutnya. Tentunya ini berkaitan dengan Pelayanan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar. Berikut beberapa penelitian sebelumnya:

| No | Penulis/ Tahun | Judul | Metode | Hasil | Perbedaan |
|----|---------------------------------------|--|------------|--|---|
| 1 | Muchamad Ridwan Satya Nurhakim (2014) | Implementasi <i>E-Government</i> Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. | Kualitatif | Perubahan teknologi akan membawa perubahan, baik perubahan yang bersifat administratif maupun perubahan budaya. Menyadari betapa sulitnya melakukan perubahan, maka harus diawali dengan adanya komitmen | Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta tahun penelitian |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|------------|--|---|
| | | | | <p>pimpinan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi informasi tersebut secara profesional. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah perlunya interaksi dan sinergi yang baik antara masyarakat, swasta dan pemerintah sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan <i>e-government</i> secara optimal.</p> | |
| 2 | R. Adi Nurzaman, Dkk (2023) | Implementasi <i>E-Government</i> pada konsep <i>Smart City</i> Pemerintah Kota Bandung dalam | Kualitatif | Salah satu sektor yang berkaitan erat dengan pelayanan publik adalah <i>smart governance</i> yang hingga saat ini masih terus | Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian serta tahun penelitian dan Teori yang digunakan |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| | | <p>Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun @009 tentang Pelayanan Publik.</p> | | <p>dikembangkan oleh pemerintah Kota Bandung dengan mengintegrasikan data, sistem dan khususnya peraturan hukum agar saling berkesesuaian sehingga pelayanan publik dalam hal perizinan, kependudukan dan pengaduan pelayanan publik dapat diberikan secara cepat, efektif dan efisien sehingga dapat meminimalisasi adanya ketidakjelasan informasi bagi masyarakat selaku pemohon pelayanan</p> | |
|--|--|---|--|---|--|

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|------------|--|---|
| | | | | pemerintahan | |
| 3 | Karman, Dkk(2021) | Implementasi <i>E- Government</i> Pada Pemerintah Daerah | Kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang mengharuskan pemerintah untuk memprioritaskan lebih banyak faktor keselamatan dalam menerapkan SPBE. Selain itu, ada berbagai solusi dalam bentuk model /kerangka kerja dalam menyelesaikan masalah dalam menerapkan konsep keamanan ke Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. | Perbedaany a terletak pada lokasi penelitian serta tahun penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut |

Sumber : Hasil Analisis dari Penelitian Terdahulu 2023

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka penulis tidak akan terlepas dari penelitian sebelumnya yang sama-sama akan membahas tentang pelayanan publik berbasis online. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan arah penelitian yang akan dituju, dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan beberapa aspek penilaian dari Azkiya dalam Karman (2008) yaitu: Epektifitas, Efisiensi, Transparansi, Akuntabilitas. Sedangkan arah penelitian yang akan dituju, peneliti menggunakan teori Indrajit (Indrajit, 2006) yang meliputi: *Support* (Pendukung), *Capacity* (Kapasitas), *Value* (Manfaat).

B. Konsep dan Teori

4. *E-Government*

1.1. Pengertian *E-Government*

E-Government merupakan upaya dalam mengembangkan penyelenggaraan yang berbasis elektronik untuk memberikan informasi dan pelayanan terhadap masyarakat dalam proses pemerintahan. Menurut Mustopadijaya dalam (Habibullah, 2010). mengusulkan bahwa *E-Government* (*e-adm*) menggantikan istilah *E-Government* yang diberikan kepada Pemerintah yang menerapkan teknologi internet, intranet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program-programnya dan jasa.

Dalam buku *Electronic Government*, Indrajit (2006) dalam menyebutkan berbagai definisi Pemerintahan elektronik (*E-Government*) yang dikemukakan baik oleh lembaga Pemerintah maupun non-Pemerintah. Kelompok Bank Dunia mendefinisikan Pemerintahan elektronik (*E-Government*) dalam konteks penggunaan teknologi informasi (misalnya teknologi informasi).

Organisasi administrasi publik mampu membangun hubungan dengan warga negara, bisnis, dan organisasi Pemerintah lainnya. Tanpa mengesampingkan pentingnya berbagai definisi yang dikemukakan di atas, setidaknya ada tiga karakteristik yang umum untuk setiap definisi (*E-Government*), yaitu:

Pertama, merupakan mekanisme interaksi baru (*modern*) antara Pemerintah dengan masyarakat dan kelompok kepentingan (*stakeholder*) lainnya. Kedua, tentang pemanfaatan teknologi informasi, khususnya internet. Tujuan ketiga yang dicapai adalah meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan kepada masyarakat.

1.2. Manfaat penerapan *E-Government*

Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *E-Government* bagi suatu negara, yaitu :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerepan konsep *Good Corporate Governance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

1.3. Konsep *E-Government*

Orientasi utama dari *E-Government* adalah tersedianya akses informasi oleh publik dibandingkan keuntungan finansial. Hal ini disebabkan bahwa target *E-Government* adalah sektor publik, oleh karena itu sistem *E-Government* pada umumnya dibangun berbasis teknologi web. Teknologi ini digunakan karena mempunyai kemampuan daya jangkau yang cepat dan luas. *E-Government* tidak hanya tentang menggunakan teknologi web saja, namun merupakan sistem sosial yang kompleks yang mencakup isu sosial didalamnya (Fasanghari, 2009).

1.4. Strategi pelaksanaan *E-Government*

E-Government sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan kualitas layanan yang lebih baik kepada masyarakat, Booz Allen dan Hamilton menyarankan 8 (delapan) strategi pelaksanaan *E-Government*:

1. Perencanaan strategis secara keseluruhan. Kombinasikan antara perencanaan dari sisi strategis dan detil operasionalnya di lapangan. Perencanaan akan membantu proses implementasi baik dari sisi pengembangan teknologi maupun kesiapan sumber daya.

2. Harus ada struktur tanggung jawab yang jelas untuk menjamin pelaksanaan dan implementasi sesuai rencana. Struktur dan tanggung jawab ini disesuaikan dengan kemampuan dan tanggung jawab kerja setiap departemen selama ini.
3. Bangun rencana aksi jangka panjang. Rencana aksi jangka panjang termasuk perencanaan strategis, aksi operasional di lapangan hingga parameter kesuksesan. Implementasi dari sisi teknologi hampir pasti memerlukan tahapan-tahapan pelaksanaan, dan faktor lain yang perlu dipikirkan adalah pembiayaan dalam jangka panjang
4. Perbandingan pelaksanaan *E-Government* secara internasional. Dengan melakukan proses perbandingan, akan lebih memudahkan bagi proses adaptasi dan penyusunan perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi secara lokal.
5. Standarisasi dalam berbagai hal. Standarisasi ini menyangkut prosedur dan juga pembangunan sistem aplikasi. Karena *E-Government* akan melibatkan berbagai sektor dan departemen dalam pemerintahan, standarisasi menjadi faktor mutlak agar memudahkan interaksi berbagai aplikasi dan memungkinkan adanya pertukaran data.
6. Orientasi pada pengguna. Tidak bisa dipungkiri, bahwa *E-Government* membutuhkan partisipasi penuh dari masyarakat sebagai pengguna. Karena itu, pengembangan sistem informasi yang akan dilaksanakan haruslah berorientasi pada kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakannya.

7. Integrasi dan keterlibatan penuh dari staf dan seluruh pegawai. Mereka perlu mendapatkan pelatihan yang memadai, dan adanya insentif yang diukur berdasarkan kesuksesan pelaksanaan *E-Government* di lapangan. Keterlibatan pegawai menjadi mutlak karena sebaik apapun sistem aplikasi yang dijalankan tidak bisa mempunyai manfaat penuh tanpa keterlibatan mereka.
8. Kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. *E-Government* adalah proyek yang sangat besar yang membutuhkan partisipasi dari berbagai kalangan. Pemerintah akan sulit menjalankan program *E-Government* tanpa partisipasi penuh dari masyarakat. Karena itu kerjasama dengan berbagai pihak terutama yang terkait secara teknis perlu dilakukan.

1.5. Jenis-jenis *E-Government*

Indrajit mengemukakan bahwa jenis-jenis *E-government* dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Publikasi

Publikasi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mengaplikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat segera langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak yang lain yang berkepentingan melalui internet.

5. Interaksi

Interaksi adalah komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada 2 jenis aplikasi yang biasa

digunakan. Pertama, bentuk portal dimana situs terkait fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi lebih spesifik. Kedua, Pemerintah menyediakan saluran dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak.

6. Transaksi

Transaksi adalah interaksi dua arah seperti kelas interaksi hanya saja terjadi pada sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Aplikasi ini jauh lebih rumit karena harus adanya sistem pengamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman, dan hak-hak *Privacy* berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik.

1.6. Elemen sukses *E-Government*

Untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: *Support*, *Capacity*, dan *Value*.

a. *Support*

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-Government*. Tanpa adanya unsur "*political will*" ini, mustahil

berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *E-Government* dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “*top down*”.

b. Capacity

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *E-Government* terkait menjadi kenyataan.

Ada tiga hal yang harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen *Capacity* (kapasitas), yaitu :

1. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-government* terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *E-government*;
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.

c. Value

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*).

Berbagai inisiatif *E-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar

tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-Government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.

7. Pelayanan publik

2.1. Pengertian pelayanan publik

Pelayanan publik adalah segala bentuk yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingan dari masyarakat. pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang prinsipnya menjadi dilaksannakan dan menjadi tanggung jawab di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (Solechan, 2019). Sedangkan dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Dalam Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, dari berbagai pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan publik adalah kewajiban pemerintah selaku penyelenggara pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah pada hakeketnya adalah pelayanan kepada masyarakat, melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap peribadi dan kelompok masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk dapat memenuhi hak rakyat khususnya pelayanan administratif yang baik dan profesional.

3.2. Masalah dalam pelayanan publik

1. Dari aspek penyelenggara

- a. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsure pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi, respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat sering kali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.

b. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya di sampaikan kepada masyarakat, lambat penyampaiannya, atau bahkan tidak sampai sama sekali kepada masyarakat.

c. Kurang *accessible*. Berbagai unit pelaksana pelayanan tertelak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan.

d. Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan tumpang kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.

e. Terlalu birokratis. Pelayanan, khususnya pelayanan perijinan, pada umumnya di lakukan dengan melalui proses yang terdiri dari beberapa meja yang harus di lalui, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama.

f. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada umumnya aparat pelayanan kurang peduli terhadap keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan diberikan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.

g. Inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan, khususnya dalam pelayanan perijinan, sering kali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan.

2. Dari aspek sumber daya

Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utama pelayanan publik oleh pemerintah adalah tentang kurangnya profesionalisme, kompetensi, empati dan etika. Dan salah satu unsur utama yang sangat perlu dipertimbangkan untuk perbaikan/peningkatan mutu pelayanan publik adalah masalah sistem remunersi (penggajian) yang sesuai bagi birokrat dapat dikurangi, atau dibersihkan.

3. Dari aspek kelembagaan

Kelemahan utama kelembagaan birokrasi pemerintah terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat yang efisien dan optimal, tetapi justru hirarkis, sehingga membuat pelayanan menjadi berbeli-belit (birokratis) dan tidak terkoordinasi dengan baik. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat dominan dilakukan oleh pemerintah, sehingga pelayanan publik menjadi tidak efisien. Sebaiknya, kedua fungsi tersebut dibagi secara seimbang antara pemerintah dan masyarakat, yaitu pemerintah sebagai pemegang fungsi pengaturan, sedangkan dalam hal-hal tertentu yang memungkinkan, masyarakat dilibatkan dalam fungsi penyelenggaraan, misalnya perencanaan dan pembangunan.

2.3. Asas-asas pelayanan publik

1. Transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2.4. Prinsip Pelayanan Publik

1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

3. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
4. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
5. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
6. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
7. Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
8. Kedisiplinan, kesopanan dan kerapian, pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
9. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

8. Konsep Aplikasi “SIAPkerja”

Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengembangkan layanan informasi ketenagakerjaan, hal tersebut bertujuan untuk memberikan akses informasi bagi seluruh warga Negara. Sistem layanan informasi yang diterapkan adalah aplikasi “SIAPkerja”.

“SIAPkerja” merupakan platform bagi segala layanan publik dan aktivitas ketenagakerjaan. Harapannya dengan adanya aplikasi SIAPkerja dapat memudahkan masyarakat dan lembaga dalam mengakses layanan yg ada karena sesuai dengan tujuannya yaitu :

- a. Membangun dan mengembangkan ekosistem digital ketenagakerjaan sehingga membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan ketenagakerjaan
- b. Mempermudah *stakeholder* (masyarakat, lembaga, perusahaan dan K/L) dalam menggunakan layanan ketenagakerjaan
- c. Dibangun dengan konsep *micro services*, dimana masing - masing layanan saling ter-integrasi dan sekaligus mewujudkan satu data
- d. Menerapkan *Single Sign On* (SSO) pada semua layanan, sehingga stakeholder hanya cukup mempunyai satu akun dan satu kali login untuk mengakses semua layanan yang ada

9. Balai Latihan Kerja

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 (Yulzain and Jumiati, 2020) yang menjelaskan tentang Ketenagakerjaan pelatihan kerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kerja, sikap, dan etos kerja peserta pelatihan pada suatu keahlian tertentu sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang ditekuni. Sedangkan menurut Abdurrahmat Fathoni (Fatoni, 2006) dalam (Yulzain and Jumiati, 2020) pelatihan merupakan usaha untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada peserta pelatihan semaksimal mungkin sehingga peserta pelatihan dapat menerima dan mempraktekkan ilmunya pada saat bekerja. Sedangkan menurut Clark (1991) dalam (PERKASA and WIDODO, 2018), pelatihan merupakan usaha untuk membuat suatu perubahan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pelatihan juga dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran yang berorientasi pada perubahan, sehingga dalam hal ini instruktur atau pelatih memiliki peranan sangat penting dalam menciptakan perubahan pada peserta pelatihan.

Informasi yang terdapat dalam sistem pelayanan publik tidak terlepas dari inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah, salah satunya terdapat di Balai Latihan Kerja. BLK ini merupakan salah satu Instansi pendukung PSDM (Pembangunan Sumber Daya Manusia), melakukan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang telah ditetapkan. Jika merujuk pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dalam (Berkat

Anugrah Kurunia, Marzuki and Affan, 2021) yang mengamati tentang persoalan ketenagakerjaan dan penghidupan yang layak menjadi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sudah menjadi tugas bagi salah satu Kementerian yakni Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selanjutnya diberikan otonomi kepada dinas tenaga kerja setiap kabupaten yang menaungi salah satu lembaga yang bergerak dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana Inovasi Pelayanan Berbasis Online di Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar yang dilihat dari beberapa aspek yang akan dilakukan seperti *Relative advantage* atau keuntungan *relative*; *Compatibility* atau kesesuaian; *Complexity* atau kerumitan maka dari semua aspek itu akan terwujud sebuah pelayanan publik yang berkualitas dan berguna bagi masyarakat umum.

Adapun yang menjadi kerangka berfikir pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berguna untuk menetapkan batasan tentang apa yang diangkat atau diselidiki supaya peneliti dapat memilah data penting dari banyaknya data yang didapatkan di lapangan. Batasan dari penelitian kualitatif lebih ditentukan oleh kepentingan, urgensi serta reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan untuk meneliti implementasi *E-Government* “SIAPkerja” dengan menggunakan teori Indrajit (2006), yaitu :

Support (Pendukung); *Capacity* (Kapasitas); *Value* (Manfaat) dan juga di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Takalar, dan faktor penghambat dalam implementasi *Electronic Government* pada UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar.

E. Deskriptif Fokus

Indrajit (2006) menjelaskan bahwa *E-Government* memiliki 3 indikator keberhasilan antara lain yaitu *Support* (Pendukung), *Capacity* (Kapasitas), *Value* (Manfaat).

1. *Support* (Pendukung)

Support (Pendukung), Adanya keinginan dari kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan *konsep E-government* dalam Program Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja) di Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar. Yang dimaksud dengan dukungan disini adalah :

- a. Disepakatinya kerangka *E-government*, bagaimana Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar memberikan prioritas tinggi untuk program “SIAPkerja” ini dengan memberikan dukungan serta fasilitas.
- b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain, dalam hal ini pemerintah berfokus untuk memilih sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan finansial untuk menunjang keberhasilan program.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Capacity (Kapasitas) adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah Kabupaten Takalar terkhususnya di Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar. Yang di maksud dengan kapasitas di sini adalah, Ada tiga hal yang harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu :

- a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-government* terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial; yaitu pemerintah meningkatkan pengelolaan sumber daya finansial dalam pengimplementasian Aplikasi “SIAPkerja” di Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar;
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, bagaimana pemerintah memfasilitasi Operator untuk kelancaran program.
- c. Ketersediaan sumber daya manusia , ketersediaan sumber daya manusia di sini di maksud adalah Operator yang memiliki keahlian.

3. *Value* (Manfaat)

Value (Manfaat) yaitu adanya manfaat yang di berikan oleh balai Latihan Kerja kabupaten Takalar kepada masyarakat dengan adanya Aplikasi “SIAPkerja”. Dari ketiga indikator di atas peneliti melihat kesesuaian dengan penerapan Aplikasi “SIAPkerja” di Balai Latihan Kerja kabupaten Takalar, sehingga saya tertarik menggunakan teori tersebut.

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *E-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi *Electronic Government* pada UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan setelah seminar proposal di laksanakan . Lokasi penelitian berada di Kabupaten Takalar yaitu UPT Balai Latihan kerja yang beralamat di Lingkungan Bilacaddi, kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran secara faktual dan menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya terkait dengan kualitas pelayanan. Peneliti menggunakan metode ini karena peneliti ingin menyajikan hasil penelitian dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari *E-Government* pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar.

Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik isu yang belum diketahui. Selain itu, metode kualitatif dapat memberikan rincian detail tentang fenomena yang sulit diungkap dengan metode kuantitatif (Sugiyono, 2019a). Adapun tipe penelitian ini adalah penelitian Deskriptif yaitu untuk

mendeskrripsikan dan mengkaji data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, data dokumentasi.

C. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti menurut Sugiyono, (Sugiyono, 2019a). Informan penelitian ini akan diwawancarai untuk mendapatkan jawaban dan data yang benar yang berkaitan dengan Implementasi E-Government pada UPT BLK Kabupaten Takalar, kualitatif pemilihan informan penelitian didasarkan pada beberapa kriteria.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu :

Tabel 3.1

Informanan Penelitian

| No | Nama | Inisial | Jabatan |
|----|--------------------|---------|--|
| 1 | Basri, S.E | BS | Kepala UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar |
| 2 | Musyawir, SE | MS | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
| 3 | Suhardi Kamiruddin | SK | Staf Bagian Tata Usaha |
| 4 | Ashari Saud | AS | Masyarakat |
| 5 | Iskandar | I | Masyarakat |

Sumber : Hasil dari analisis dan observasi

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai konteks, dari berbagai sumber, dan dengan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah (natural condition), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih menitikberatkan pada observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi menurut (Sugiyono, 2019b).

1. Observasi yang dilakukan di lapangan melalui pengamatan secara langsung terkait Implementasi aplikasi “SIAPkerja” dalam mewujudkan *electronic governmeent* yang berkualitas di Kabupaten Takalar. Selain itu observasi dapat dilakukan dengan melihat kondisi sekitar mengenai dalam hal melayani dan melakukan tanya jawab dengan peneliti.
2. Wawancara akan dilakukan dengan Pegawai di UPT BLK Kabupaten Takalar dan masyarakat yang dalam hal ini adalah peserta pelatihan. Wawancara tersebut akan membahas mengenai *Implementasi Elecronic Government* “SIAPkerja” pada BLK Kabupaten Takalar.
3. Dokumentasi yang diperoleh untuk ini yaitu berupa foto mengenai kondisi di UPT BLK Kabupaten Takalar. Hal tersebut dapat menjadi bukti.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman, dalam (Sugiyono, 2019b) yaitu:

1. Pengumpulan Data

kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi (Sugiyono, 2019).

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2019), data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data berarti merangkum dan memilah hal-hal pokok untuk memfokuskan pada satu hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan dapat memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Pada penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Menurut Sugiyono (2019), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat penelitian. Jika penelitian pada tahap awal didukung berdasarkan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dan mudah untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Sugiyono, (2019) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Pada triangulasi terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu, yaitu sebagai berikut:

a) Triangulasi Sumber Data

Untuk memeriksa keabsahan data dilakukan dengan cara meneliti data yang diperoleh dari beberapa sumber. Data yang dihasilkan dianalisis

oleh peneliti untuk menarik kesimpulan, kemudian diperlukan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

b) Triangulasi Teknik

Untuk mengecek keabsahan data dilakukan dengan cara melakukan verifikasi cek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, mengecek data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika teknik pengujian pengabsahan data menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan untuk memastikan bahwa data tersebut dianggap benar.

3. Traingulasi Waktu

Pengumpulan data melalui teknik wawancara pada pagi hari saat informan masih segar akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Atau ini dapat dilakukan dengan memverifikasi dengan wawancara, observasi atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang untuk menciptakan kepastian data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar

a) Sejarah singkat dan lokasi UPT BLK Kabupaten Takalar

UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar didirikan berdasarkan Peraturan Bupati Takalar No: 15 Tahun 2010 Tentang: Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar Serta Uraian Tugas Dan Fungsinya. Pembangunan gedung UPT Balai Latihan kerja Kab. Takalar di biayai melalui APBN oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) pada program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja tahun 2009, 2010 dan 2011.

Luas lahan untuk UPT Balai Latihan Kerja Kab. Takalar + 62.000 M² (6,2 Ha) berlokasi di Jl. Mosi Dg. Nakku Lingkungan Billacaddi Kelurahan Kalabbirang Kabupaten Takalar Prov. Sulawesi Selatan dengan jumlah workshop 6 unit, ruang kelas 6 unit dan 1 unit kantor.

UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Takalar dibangun pada tahun 2010, dibangun di atas tanah seluas 2 Ha dengan perkembangan program kejuruan yang disediakan saat ini yaitu: Kejuruan Teknik las, Teknik listrik, Menjahit, Komputer, Tata kecantikan, Otomotif, Prosesing.

b) Visi dan Misi UPT BLK Takalar

a. Visi

Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten serta mandiri melalui pelatihan berbasis kompetensi menuju masyarakat yang sejahtera unggul dan bermartabat.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan program pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem metode pelatihan kerja sesuai standar yang dipersyaratkan.
- 3) Membangun jejaring dengan stakeholder bidang ketenagakerjaan
- 4) Mengembangkan tempat uji kompetensi.

c) Program pelatihan

UPT Balai Latihan kerja Kab. Takalar memiliki 8 (delapan) Kejuruan dengan rincian program pelatihan:

- a. Kejuruan Teknik Listrik program pelatihan : Instalasi Listrik Bangunan Sederhana & Instalasi Otomasi Listrik Industri.
- b. Kejuruan Menjahit Program Pelatihan : Menjahit Dengan Mesin, Asisten Operator Costum Made Pakaian Wanita dan Menjahit sesuai style.
- c. Kejuruan Otomotif Sepeda Motor program pelatihan : *Service* sepeda Motor *System* Injeksi & *Service* sepeda Motor *System konvensional*.

- d. Kejuruan Komputer (IT) Program pelatihan : Operator Komputer & Desain Grafis..
- e. Kejuruan Tata Rias Program pelatihan : Merias Wajah dan Rambut.
- f. Kejuruan Las Program pelatihan : Pengelasan SMAW 3G.
- g. Kejuruan *Processing* Program pelatihan : Pengolahan hasil kelautan dan pertanian.
- h. Kejuruan *Refrigerasi* Program pelatihan : Perawatan *AC Split* dan Teknisi Kulkas.

4. Kedudukan dan fungsi UPT BLK Kabupaten Takalar

a. Kedudukan

UPT BLK Kabupaten Takalar merupakan lembaga yang menyelenggarakan proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

b. Fungsi

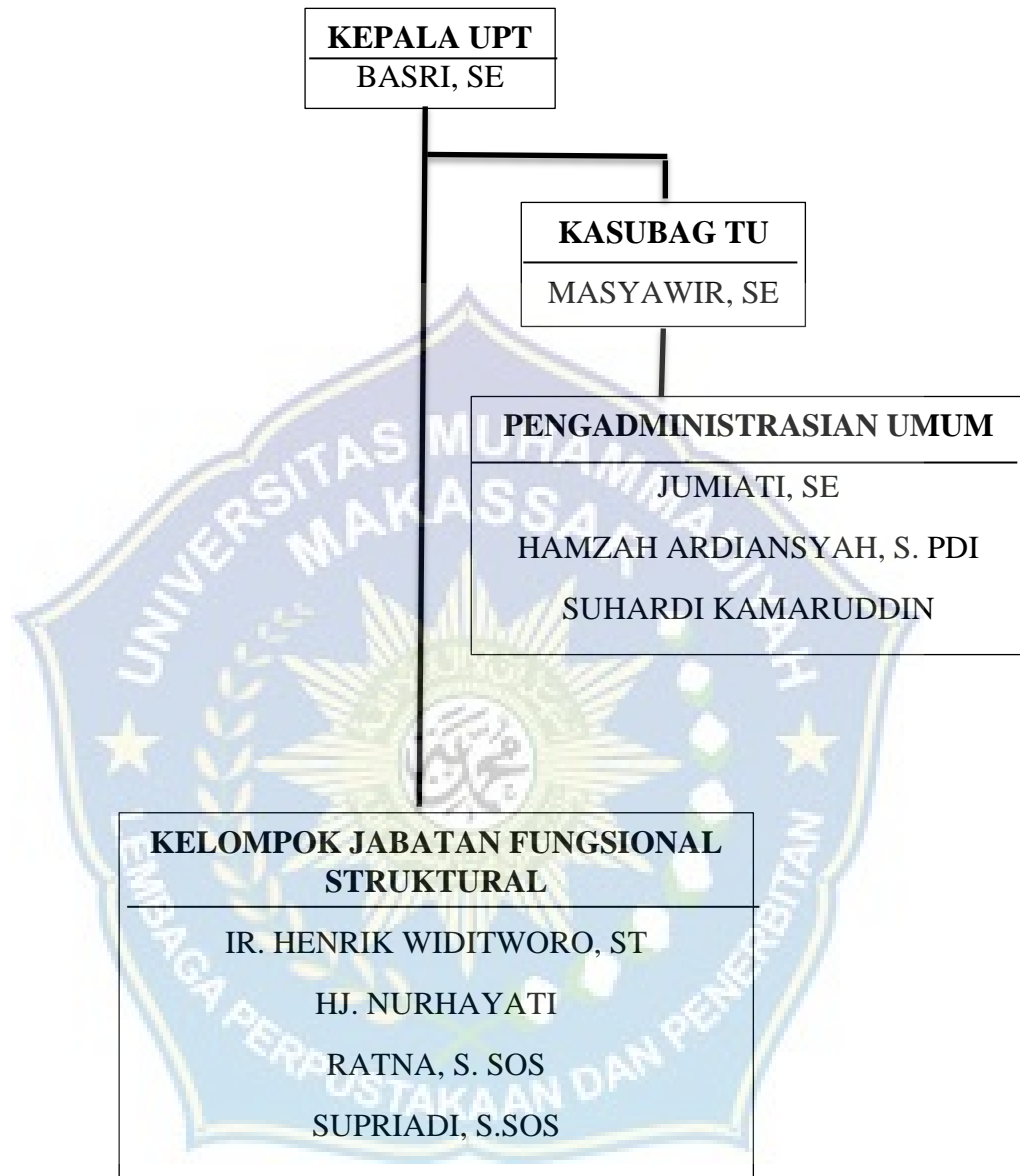
Melaksanakan program latihan kejuruan sebagai kursus profesi, baik yang diselenggarakan secara kelembagaan oleh BLK Takalar maupun yang diselenggarakan oleh lembaga Pemerintahan Lainnya yang telah melakukan hubungan kerjasama.

5. Tujuan UPT BLK Kabupaten Takalar

- a. Sebagai tempat belajar untuk orang-orang belum memiliki keterampilan khusus.
- b. Menciptakan sinergi antara sesama magang dan Sebagai wadah peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kesempatan kerja di Indonesia pada umumnya, dan di Takalar khususnya.



6. Struktur Organisasi UPT Balai Latihan Kerja Takalar



Gambar 2. Bagan Struktural Organisasi UPT BLK Kabupaten Takalar

Berdasarkan Stuktur Organisasi UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar diatas, maka pembagian tugasnya sebagai berikut:

a. Kepala UPT BLK

Kepala UPT Balai Latihan Kerja memiliki tugas yaitu memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku misalnya mengkoordinas penyusunan bahan kegiatan teknis, rencana program, evaluasi dan pelaporan pada Balai Latihan Kerja.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kasubag TU memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan personel, keuangan, peralatan dan rumah tangga, komunikasi dan pelaporan ke Balai Latihan Kerja

c. Pengadministrasian Umum

Pengadministrasian Umum memiliki tugas dalam menerima, dan menyortir surat masuk dan surat keluar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, selain itu melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis dan lisan kepada atasan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional Instruktur

Instruktur pelatihan Kejuruan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang atau kejuruan tertentu.

7. Sarana dan Prasarana

a. Tanah

Tanah milik UPT BLK Takalar serta tempat pelatihan berada di Jalan Mosi Dg. Nakku Lingkungan Bilacaddi Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Takalar dan dibangun di atas tanah seluas 2 hektar.

b. Fasilitas UPT BLK Kabupaten Takalar yaitu:

UPT Balai Latihan Kerja sangat penting menyediakan fasilitas yang dapat mendukung dalam menunjang kegiatan pelatihan.

Tabel 4.1
Fasilitas UPT BLK Kabupaten Takalar

| No. | Fasilitas Kantor | Jumlah |
|-----|-----------------------------|--------|
| 1. | Aula | 1 Unit |
| 2. | Ruangan Kepala UPT BLK | 1 Unit |
| 3. | Ruangan Administrasi | 1 Unit |
| 4. | Ruangan Kejuruan Komputer | 1 Unit |
| 5. | Ruangan Kejuruan Menjahit | 1 Unit |
| 6. | Ruangan Kejuruan Las | 1 Unit |
| 7. | Ruangan Kejuruan Listrik | 1 Unit |
| 8. | Ruangan Kejuruan Processing | 1 Unit |
| 9. | Ruangan Kejuruan Otomotif | 1 Unit |
| 10. | Ruangan Kejuruan Teknisi AC | 1 Unit |
| 11. | Musholla | 1 Unit |
| 12. | Toilet | 9 Unit |
| 13. | Gudang | 1 Unit |
| 14. | Tempat Parkir | 1 Unit |

Sumber : UPT BLK Kabupaten Takalar

c. Sumber daya Manusia di UPT BLK Kabupaten Takalar

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat 20 banyaknya pegawai di Balai Latihan Kerja di Kabupaten Takalar, sebanyak 10 orang ASN dan 10 orang Honorer. Pegawai tersebut telah ditempatkan disetiap setiap spesialisasi keahlian mereka untuk melakukan tugasnya masing-masing. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Jumlah Pegawai UPT BLK Kabupaten Takalar

| No. | Jabatan | Jumlah |
|-----|--|--------|
| 1. | Kepala UPT BLK Kabupaten Takalar | 1 |
| 2. | Jabatan Fungsional Umum | 4 |
| 3. | Jabatan Fungsional Instruktur dan Asisten Instruktur | 15 |

Sumber : Daftar Pegawai UPT BLK Kabupaten Takalar

d. Program Pelatihan UPT BLK Kabupaten Takalar

Kejuruan di UPT BLK Kabupaten Takalar sudah diatur sesuai dengan kegiatan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI yang engacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), termaksud di dalamnya mengenai jumlah peserta pelatihan yaitu terdiri dari 16 peserta dari setiap kejuruan. Ada 8 jenis pelatihan yang ada di Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3**Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pelatihan**

| No. | Kejuruan | Jumlah Peserta |
|-----|----------------------------|----------------|
| 1. | Kejuruan Teknik Listrik | 16 Orang |
| 2. | Kejuruan Teknik Pendingin | 16 Orang |
| 3. | Kejuruan Teknik Pengelasan | 16 Orang |
| 4. | Kejuruan Teknik Otomotif | 16 Orang |
| 5. | Kejuruan Komputer | 16 Orang |
| 6. | Kejuruan Menjahit | 16 Orang |
| 7. | Kejuruan Tata Kecantikan | 16 Orang |
| 8. | Kejuruan Processing | 16 Orang |

Sumber : UPT BLK Kabupaten Takalar

Tabel 4.4**Masa Waku pelatihan berdasarkan jenis pelatihan**

| No. | Program Pelatihan | Lama Pelatihan |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| A. Kejuruan Teknik Komputer | | |
| 1. | Operator Komputer | 33 Hari |
| 2. | Desai Grafis | 30 Hari |
| B. Kejuruan Teknik Listrik | | |
| 1. | Instalasi Listrik Bangunan Sederhana | 30 hari |
| 2. | Instalasi Otomasi Listrik Indusdri | 30 Hari |
| C. Kejuruan Menjahit | | |

| | | |
|-------------------------------|--|---------|
| 1. | Menjahit dengan mesin | 33 Hari |
| 2. | Asisten Operator Costum Pakaian Wanita | 33 Hari |
| 3. | Menjahit Sesuai Style | 33 Hari |
| D. Kejuruan Tata Rias | | |
| 1. | Merias Wajah | 30 Hari |
| 2. | Merias Rambut | 30 Hari |
| E. Kejuruan Processing | | |
| 1. | Pengolahan Hasil Kelautan | 30 Hari |
| 2. | Pengolahan Hasil Pertanian | 30 Hari |
| F. Kejuruan Tehnik Pendingin | | |
| 1. | Perawatan AC Split | 30 hari |
| 2. | Tehnik Kulkas | 30 hari |
| G. Kejuruan Tehnik Otomotif | | |
| 1. | Service Sepeda Motor Injeksi | 30 hari |
| 2. | Service Sepeda Motor System Konvensional | 30 hari |
| H. Kejuruan Tehnik Pengelasan | | |
| 1. | Pengelasan SWAW 3G | 43 Hari |

Sumber : UPT BLK Kabupaten Takalar

e. Jumlah Masyarakat yang telah menggunakan aplikasi “SIAPkerja”

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa aplikasi “SIAPkerja” sejak pertama kali digunakan di BLK Kabupaten Takalar pada awal bulan Januari tahun 2023 sampai bulan Agustus 2023 tercatat 96 orang

dari 6 pelatihan yang terlaksana dan sudah pernah mengakses aplikasi “SIAPkerja” ini, 6 pelatihan itu adalah Kejuruan Teknik Las, Kejuruan Menjahit, Kejuruan Otomotif, Kejuruan Teknik Pendingin, dan Kejuruan Tatakecantikan.

B. Hasil Penelitian

1. Implmentasi *Electronic Government* “SIAPkerja” pada UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar

Berikut hasil penenlitian tentang Implementasi *Electronic Government* pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar yang telah dilakukan dengan menggunakan Teknik yang sudah ditentukan berdasarkan dari indikator *Support* (dukungan), *Capacity* (kapasitas), *Value* (manfaat) yaitu.

a. *Support* (Dukungan)

Support atau dukungan merupakan elemen pertama dalam penerapan *E-Government*. Sebab dalam menerapkan *E-Government* disuatu Instansi Pemerintah sangat di perlukan dukungan dari Pimpinan instansi yang menaunginya dalam mendukung penerapan tersebut. Tanpa adanya unsur *support* ini, akan berat berbagai bentuk pembangunan dan pengembangan *E-Government* dapat berjalan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen top down, maka jelas dukungan implementasi program *e-government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi. Yang dimaksud bukanlah hanya omongan semata, namun lebih

jauh lagi dukungan yang diharapkan. Disepakatinya kerangka *e-government* sebagai salah satu kunci sukses negara atau pemda dalam mencapai visi dan misi bangsa atau daerahnya sehingga harus diperhatikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain yang diperlukan. Yang dimaksud dengan dukungan disini terbagi menjadi 2 indikator adalah : 1.) Disepakatinya kerangka *E-government* dan memberikan prioritas untuk program “SIAPkerja” ini dengan memberikan dukungan serta fasilitas. 2.) Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain).

- 1.) Disepakatinya kerangka *E-government* dan memberikan prioritas untuk program “SIAPkerja” ini dengan memberikan dukungan serta fasilitas. Berikut pengungkapan dari Kepala UPT BLK Kabupaten Takalar (B) Implementasi *Electronic Government* “SIAPkerja pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar mengenai *Support* (dukungan):

“Benar ada prioritas dari pihak kami untuk melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus, dan itu menjadi salah satu alasan kami menerapkan aplikasi secara online dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang kedua untuk menghindari pungli/calo. Jadi masyarakat bisa langsung mengakses dari rumah”.

Senada dengan pernyataan diatas, (M) selaku Kasubag TU UPT BLK Kabupaten Takalar juga mengatakan bahwa:

“mengenai prioritas untuk melakukan inovasi dalam melakukan pelayanan itu bukan hanya karena tuntutan zaman tapi memang menjadi kebutuhan semua belah pihak baik itu dari BLK ataupun dari masyarakat karena dengan adanya inovasi pelayanan online ini

masyarakat akan dipermudah aksesnya dan mengurangi penghemat pengeluaran dari Masyarakat.

Berdasarkan dua hasil wawancara diatas diatas dapat disimpulkan bahwa Pimpinan UPT BLK Kabupaten Takalar memang telah memiliki prioritas dalam menerapkan pelayanan berbasis online (*E-Government*) dengan maksud terus memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat dengan mengantisipasi banyaknya masyarakat yang datang ke Kantor yang tentunya akan menambah pengeluaran dari masyarakat dan juga mencegah masyarakat untuk melakukan calo.

- 2.) Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain. Karena tanpa ada nya dukungan dari pemerintah dalam penerapan pelayanan berbasis online maka aplikasi SIAPkerja akan susah dilaksanakan. Berikut pengungkapan dari Kepala UPT BLK Kabupaten Takalar (B) Implementasi *Electronic Government* “SIAPkerja pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar mengenai *Support* (dukungan):

“Sejauh ini perihal dukungan dari Pemerintah itu masih sebatas kebijakan yang mengatur pelaksanaan e-government dalam pelayanan publik tapi mengenai dukungan alokasi SDM dan Keuangan untuk penggunaan aplikasi SIAPkerja ini, itu masih bersumber dari internal BLK dan sampai saat ini belum ada dukungan baik itu alokasi SDM maupun Keuangan dari Disnaker maupun Pemerintah Daerah , tapi masih belum tau kedepannya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan implementasi e-government melalui aplikasi

“SIAPkerja” bisa dikatakan cukup baik, dengan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah dalam bentuk kebijakan, walaupun tidak pengalokasian anggaran dana khusus dalam proses penerapannya tapi dengan menggunakan fasilitas yang ada di BLK Kabupaten Takalar sudah dapat menunjang kinerja operator, sehingga menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dan menjadikan program ini berjalan dengan sukses.

b. Capacity (Kapasitas)

Keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan tidak bisa lepas dari adanya capacity yakni sumber daya finansial, sumber infrastruktur dan sumber daya manusia yang dapat mendukung proses kelancaran suatu pelaksanaan program. Hal ini menurut Darumurti dalam bukunya menyatakan bahwa “aspek penting yang harus dipersiapkan adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana serta organisasi dan manajemennya”. Yang dimaksud dengan *Capacity* (kapasitas) disini terbagi menjadi 3 indikator adalah : 1.) Ketersediaan Sumberdaya yang cukup, 2.) Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, 3.) Ketersediaan Sumber Daya Manusia.

- 1.) Ketersediaan Sumberdaya Finansial yang cukup dalam mendukung penerapan *E-Government* sebab faktor ini sangatlah menentukan terpenuhinya sumber daya lainnya dalam penerapan *E-Government* ini yang dimana tentunya membutuhkan dana finansial yang cukup baik pada tahap persiapan maupun pada tahap pelaksanaan sebab

menentukan terpenuhinya infrastruktur teknologi yang baik. Berikut pengungkapan dari Kepala UPT BLK Kabupaten Takalar (BS) Implementasi Electronic Government SIAPkerja pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar mengenai *Capacity* (Sumber Daya):

“Aplikasi SIAPkerja ini kami bekerja sama dengan Kemnaker, jadi langsung Kemenaker yang buat sesuai koordinasi kami. Tidak ada anggaran dana kepada pihak BLK”.

“Untuk anggaran sosialisasi SIAPkerja hanya anggaran dari BLK itu sendiri, untuk saat ini belum ada, masih belum tau kedepannya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan mengenai sumber daya finansial, tidak ada anggaran dana yang diberikan kepada BLK, Kemnaker yang membuat aplikasinya dan BLK yang melaksanakannya. Dan untuk anggaran yang dikeluarkan ketika melakukan sosialisasi terkait aplikasi SIAPkerja, dan anggaran pemeliharaan untuk saat ini belum ada, tapi masih belum tau kedepannya akan ada atau tidak terkait anggaran pemeliharaan SIAPkerja. Sumber daya finansial bukanlah permasalahannya karena pihak BLK Takalar tidak mengeluarkan dana untuk proses pembuatan aplikasi SIAPkerja atau pendanaan untuk melakukan update atau pembaruan aplikasi hanya mengeluarkan dana untuk mencetak spanduk. Karena SIAPkerja sistemnya di Kemnaker, mereka yang membuat aplikasinya dan juga melakukan update apabila ram aplikasinya penuh.

2.) Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, Adanya Sumber daya infrastruktur Teknologi Informasi yang dimana ketersediaan infrastruktur ini menjadi salah satu kunci keberhasilan penerapan E-

Government ini. Konsep pengembangan infrastruktur diarahkan kepada pemanfaatan semaksimal mungkin sumber daya informasi yang telah ada sebagai modal utama dalam mengembangkan e-government. Pengembangan e-government pada saat lembaga, selain akan meningkatkan pemanfaatan sistem informasi yang dimiliki, juga diharapkan meningkatkan layanan publik dan operasional pengelolaan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien. Selain memiliki pimpinan yang *e-leadership*, perlengkapan dan peralatan kantor Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar sudah cukup memadai untuk penyelenggaraan *e-government*. Berdasarkan wawancara saya dengan Kepala Subbagian Tata (MS) Usaha Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar mengenai ketersediaan Sumber daya Infrastruktur Teknologi Informasi di BLK kabupaten Takalar :

“Kami kami dari pihak BLK telah menyiapkan Fasilitas berupa ruangan khusus dan untuk oprator dan tentunya alat-alat pendukung seperti komputer dan alat-alat pendukung lainnya.”.

Berdasarkan hasil wawancara saya diatas mengenai sumber daya infrastruktur teknologi informasi di BLK Kabupaten Takalar sangat memadai dalam menerapkan pelayanan online dimana ketersediaan infrastruktur teknologi merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan pelayanan online atau *e-government* ini.

3.) ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pelayanan online. Pada dasarnya sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan dalam mengoperasikan atau menggunakan

Teknologi Informasi yang tersedia. Sumber daya manusia yang sangat diperlukan untuk pengembangan Aplikasi SIAPkerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar yaitu sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau skill di bidang IT. Paling tidak mereka telah memiliki bekal pengetahuan tentang komputer, aplikasi dan penggunaannya. maka peran penting pemerintah dalam memberikan pelatihan kepada operator agar mereka cepat berkembang. Berdasarkan wawancara saya dengan bagian Pengadministrasian Umum (SK) Usaha Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar mengenai ketersediaan Sumber daya Manusia di UPT BLK Kabupaten Takalar, dia mengatakan :

“Kami sudah ada operator, jadi sudah di bagi untuk komputer offline nya berapa dan online nya berapa. Operator online dan tenaga dari pegawai kontrak ada satu orang operator dan dilihat kedepan nya kalau SiPaduko berjalan lancar dan tidak cukup satu orang maka ditambahkan, sekarang SIAPkerja masih dalam uji coba”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UPT BLK Kabupaten Takalar memiliki sumber daya manusia yang cukup bagus dikarenakan pimpinan memberikan pembekalan terkait penggunaan SIAPkerja diberikan kepada operator agar mereka belajar memahami alur pemakaian aplikasi SIAPkerja agar kedepannya bisa dilaksanakan dengan baik.

c. *Value (Manfaat)*

Kunci kesuksesan penerapan *E-Government* yang ketiga ialah value. Penerapan *E Government* mempunyai berbagai manfaat terutama

bagi masyarakat sebagai penerima layanan. Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *e-government* tidak akan berguna jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut dan dalam hal ini, yang menentukan besarnya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan. Untuk itulah, maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas dalam pembangunan suatu aplikasi *e-government* agar benar-benar memberikan manfaat (*value*) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.

Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan boomerang bagi pemerintah yang akan mempersulit meneruskan usaha pengembangan konsep *e-government*. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan dalam penerapan aplikasi SIAPkerja. Adapun hasil wawancara saya dengan masyarakat (AS) terkait manfaat yang dirasakan dalam penerapan pelayanan online berbasis aplikasi di Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar sebagai berikut :

“Saat menggunakan aplikasi ini tentunya mengalami hambatan dikarenakan jaringan yang kadang kurang bagus dan masih kurang mengerti menggunakan aplikasi itu penggunaan aplikasi SIAPkerja ini tapi keuntungannya tentunya akan menghemat waktu, biaya dan tenaga”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya aplikasi SIAPkerja ini akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi dan tentunya akan waktu, biaya dan tenaga dari masyarakat itu sendiri tapi disisi lain ada beberapa kendala yang dihadapi misalnya jaringan yang tidak stabil dan masih ada beberapa Masyarakat yang kurang mengerti penggunaan aplikasi tersebut.

Sejalan dengan hasil Manfaat saya dengan Bapak Iskandar (I) yang dirasakan oleh Masyarakat dalam penerapkan *E-Government* atau pelayanan online sebagai berikut :

“Menurut saya ada nya aplikasi SIAPkerja ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terkhususnya kami yang peserta pelatihan karna mempermudah dalam pengurusan, dimana dapat menghemat waktu,biaya dan jarak”.

Menurut hasil wawancara diatas adanya penerapan pelayanan online ini membuat pelayanan kepada masyarakat itu lebih efektif dan efisien dan juga dapat memudahkan masyarakat dalam hal ini adalah peserta pelatihan di BLK Kabupate Takalar dalam pengurusan.

2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi *Electronic Government* pada UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar

a. Jaringan yang tidak stabil

Jaringan merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam penerapan e-Government, karena dengan tersedianya jaringan mampu menghubungkan computer dengan seluruh dunia dan memberikan

kemudahan bagi pengguna layanan. Berdasarkan wawancara saya dengan Kepala Subbagian Tata (MS) Usaha Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar mengenai Faktor penghambat dalam penerapan Aplikasi “SIAPkerja” pada UPT BLK Kabupaten Takalar :

“Jaringan yang menjadi kendala paling utama yang sering kami hadapi, terkadang jaringan bermasalah sehingga membuat pekerjaan kami tertunda, karena kami masi menggunakan jaringan wifi yang terbatas akibatnya operator akan kesulitan mmemberkan pelayanan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa jaringan merupakan suatu aspek terpenting dalam mmenerapkan aplikasi “SIAPkerja”. Jaringan yang kurang baik akan sangat menghambat kinerja dari pihak BLK. Yang dapat mengakibatkan kurang efektif dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

b. Masyarakat Kurang Memahami Teknologi

Kebutuhan dan penggunaan akan teknologi informasi yang diaplikasikan dengan Internet dalam segala bidang seperti *e government*, telah menjadi sesuatu yang lumrah. Bahkan apabila masyarakat terutama yang hidup di kota besar tidak tersentuh dengan persoalan teknologi informasi dapat dipandang terbelakang atau ”Gaptek”. Berdasarkan wawancara saya dengan bagian Pengadmiistrasian Umum (SK) BLK Kabupaten Takalar mengenai faktor-faktor penghambat dalam menerapkan aplikasi “SIAPkerja” di UPT BLK Kabupaten Takalar, dia mengatakan :

“Malasah yang sering kami temui banyaknya masyarakat yang masih tidak paham menggunakan aplikasi yang telah disediakan misalnya banyak yang datang ke kantor untuk melakukan

pendaftaran pelatihan padahal sudah bisa diakses di rumah masing-masing”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa masalah yang sering muncul dalam menerapkan aplikasi “SIAPkerja” salah satunya datang dari masyarakat itu sendiri, banyaknya masyarakat yang tidak mengerti terkait teknologi yang semakin canggih yang dapat mengakibatkan masyarakat untuk datang ke kantor Balai Latihan Kerja kabupaten Takalar untuk melakukan pendaftaran peserta pelatihan padahal sudah bisa diakses di tempat masing-masing.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

2. Implementasi *Electronic Government* “SIAPkerja” pada UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar

Telah dipaparkan secara terinci tentang hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi *Electronic Government* SIAPkerja pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar yang dalam pengukuran implementasi *Electronic Government* nya menggunakan tiga indikator yaitu: *Support* (dukungan), *Capacity* (kapasitas), *Value* (manfaat).

a. *Support* (dukungan)

Menurut Notoatmodjo (2003), *Support* merupakan upaya yang diberikan seseorang baik itu moril maupun material untuk memotivasi orang lain dalam melaksanakan suatu kegiatan. Sedangkan Menurut teori dari Indrajit (2008), bahwa *Support* ini merupakan elemen yang paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah yaitu adanya

keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *E-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *E-Government*. Berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *E-Government* dapat berjalan dengan mulus, karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “top down”,

Support atau dukungan merupakan aspek penting dalam pengembangan *e-government* yaitu adanya dukungan dari pemerintah yang menjadi salah satu awal dari inisiatif pembangunan *e-government* yaitu kebijakan yang telah disepakati oleh pejabat publik yang diselenggarakan secara mudah untuk dipahami, mudah dilaksanakan dan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada. dalam pengembangan *e-government*, kebijakan diatur dalam intruksi presiden nomor 3 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi *pengembangan E-Government*.”

Dukungan juga berbentuk kebijakan yaitu pada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar No. 9 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam mengelola sumber daya. Adanya permasalahan dan kebijakan

pemerintah yang telah disebut kan menjadi faktor pendorong dilakukannya inovasi pelayanan publik dengan adanya inovasi pelayanan berbasis Online.

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan layanan melalui *Electronic Government (E-Government)*, guna membentuk tata kelola Pemerintah yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan yang efektif. Dalam penerapan *E-Governmnet* Pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar, pihak BLK menerapkan pelayanan online yaitu dengan menggunakan aplikasi SIAPkerja.

Dapat dilihat dari teori diatas dan juga kondisi di UPT BLK Kabupaten Takalar dapat ditangkap bahwasanya ada keterkaitan hubungan atau sebab akibat yang terjadi karena untuk mengimplementasikan aplikasi “SIAPkerja pada BLK Kabupaten Takalar, tentu perlu dukungan ataupun dorongan dari pemmerintah dan juga karena adanya inisiatif dari pihak BLK Kabupaten Takalar.

b. *Capacity* (kapasitas)

Menurut Darumurti (2003) dalam bukunya menyatakan bahwa “aspek penting yang harus dipersiapkan adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana serta organisasi dan manajemennya”.

Menurut yang dikatakan indrajit (2006) dalam bukunya adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *E-Government* terkait menjadi kenyataan. Ada

tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

- 1.) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-Government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;
- 2.) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan konsep *E-Government*; dan
- 3.) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *E-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

dalam bukunya juga mengatakan bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan *E-Government*, terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada di luar jangkauan (wilayah kontrol) pemerintah. Justru pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha kerja sama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan (*outsourcing*) berbagai teknologi yang tidak dimiliki, dan lain sebagainya.

Pengembangan *e-government* pada saat lembaga, selain akan meningkatkan pemanfaatan sistem informasi yang dimiliki, juga diharapkan meningkatkan layanan publik dan operasional pengelolaan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien. Selain memiliki pimpinan yang *e-leadership*, perlengkapan dan peralatan kantor Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar sudah cukup memadai untuk penyelenggaraan *e-government*.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pelayanan online. Pada dasarnya sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan dalam mengoperasikan atau menggunakan Teknologi Informasi yang tersedia. Sumber daya manusia yang sangat diperlukan untuk pengembangan Aplikasi SIAPkerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar yaitu sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau skill di bidang IT. Paling tidak mereka telah memiliki bekal pengetahuan tentang komputer, aplikasi dan penggunaannya. maka peran penting pemerintah dalam memberikan pelatihan kepada operator agar mereka cepat berkembang.

Ketersediaan sumber daya manusia yang merupakan hal yang sangat penting dalam konsep penerapan *E-Government* karena adanya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai akan mendorong pengembangan dan implementasi *E-Government*,

sebaliknya apabila sumber daya manusia yang tersedia tidak memenuhi harapan yang diinginkan maka hal ini dapat menghambat pengembangan *E-Government*.

Dari teori diatas dan juga kondisi di UPT BLK Kabupaten Takalar dapat ditangkap bahwasanya ada keterkaitan hubungan atau sebab akibat yang terjadi karena untuk mengimplementasikan aplikasi “SIAPkerja pada BLK Kabupaten Takalar, tentu tidak bisa lepas dari adanya *capacity* yakni sumber daya finansial, sumber infrastruktur dan sumber daya manusia yang dapat mendukung proses kelancaran suatu pelaksanaan program di UPT BLK Kabupaten Takalar.

Adanya sumber daya finansial yang mendukung penerapan *E-Government* sebab faktor finansial sangatlah menentukan terpenuhinya sumber daya lainnya dalam penerapan *E-Government* ini yang dimana tentunya membutuhkan dana finansial yang cukup besar baik pada tahap persiapan maupun pada tahap pelaksanaan sebab menentukan terpenuhinya infrastruktur teknologi yang baik.

c. Value (manfaat)

Menurut Koentjaraningrat dalam Furqon (2010), *Value* konsepsi-konsepsi yang ada dalam pikiran masyarakat mengenai hal yang berarti dalam hidup. Sedangkan yang dikatakan Indrajit (2006) dalam bukunya, Elemen *value* berdasar pada manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan *E-Government*.

Berbagai inisiatif *E-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *E-Government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep *E-Government*.

Dalam Faktor *value* yang menentukan besar tidaknya manfaat *E-Government* adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan. Kunci kesuksesan penerapan *E-Government* yang ketiga ialah *value*. Penerapan *E Government* mempunyai berbagai manfaat terutama bagi masyarakat sebagai penerima layanan. Penerapan *E-Government* dalam pelayanan berbasis online melalui aplikasi SIAPkerja ini dilihat dari segi manfaat sudah dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat dalam hal ini pelayanan online di UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar.

Dari teori diatas dan juga melihat kondisi di UPT BLK Kabupaten Takalar dapat ditangkap bahwasanya ada keterkaitan hubungan yang terjadi karena untuk mengimplementasikan aplikasi “SIAPkerja pada BLK Kabupaten Takalar, tentu ada *value* atau manfaat yang diberikan karena sebab itulah sebelum poin penting kenapa *electronic Government* “SAIPkerja” in perlu diterapkan.

3. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi *Electronic Government* pada UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar

Faktor Penghambat yang mempengaruhi Implementasi *E-Government* Pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar yaitu :

1.) Jaringan Tidak Stabil

Perkembangan yang pesat akan teknologi komunikasi menyebabkan peningkatan permintaan akan aplikasi dan jaringan berkecepatan tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Ned Snell (2003) mengatakn bahwa jaringan internet merupakan sebua wadah untuk berbagai sumberdaya yang ada di dalamnya. Kemudian seluruh sumberdaya tersebut dapat diakses melalui alat tertentu yang berbeda-beda. Jaringan Internet (Wifi) yang ada di Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar dalam melaksanakan pelayanan aplikasi “SIAPkerja” terkadang kurang stabil, hambatan itu terjadi dalam jaringan pada saat menggunakan aplikasi “SIAPkerja” terganggu maka penginputan data juga terganggu sehingga membuat kinerja operator menjadi terganggu dan membuat berkas atau dokumen-

dokumen yang dimasukkan oleh masyarakat tersebut menjadi menumpuk.

2.) Masyarakat Kurang Memahami Teknologi

Dengan perkembangan teknologi saat ini semakin memudahkan proses komunikasi tanpa memikirkan jarak, ruang dan waktu, serta lebih mudah dalam memperoleh informasi dengan memperolehnya lebih cepat. Sama halnya dengan penerapan sistem pelayanan online ini, akan tetapi pelaksanaan pelayanan dalam aplikasi "SIAPkerja" kurang berjalan baik. Berdasarkan observasi mendapati banyaknya masyarakat yang tidak mengerti terkait teknologi yang semakin canggih atau gptek yang pada akhirnya membuat masyarakat untuk datang ke kantor Balai Latihan Kerja kabupaten Takalar untuk melakukan pendaftaran peserta pelatihan walaupun nantinya diarahkan langsung oleh pihak BLK. Sehingga sosialisasi perlu dilakukan lebih intensif oleh pihak BLK kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi *Electronic Government* “SIAPkerja” Pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-government di BLK Kabupaten Takalar berdampak positif bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari elemen sukses penerapan *e-government* melalui aplikasi “SIAPkerja” yaitu dukungan, sumber daya dan manfaat.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, menjawab dua rumusan masalah yang telah diajukan maka dapat disimpulkan: Elemen sukses penerapan *e-government* melalui aplikasi “SIAPkerja” yang dinilai baik yang sudah dilakukan oleh UPT BLK Kabupaten Takalar : yang pertama pada Elemen *Support* (dukungan) dinilai sudah baik karena dilihat dari sisi dukungan dari pemerintah melalui kebijakan yang dibuat dalam proses penerapan aplikasi “SIAPkerja” pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar. Selanjutnya pada Elemen *Capacity* (sumber daya) di UPT BLK Kabupaten Takalar dinilai sudah cukup baik, dengan ketersediaan sumber daya manusia yaitu operator telah dibekali dengan ilmu yang diberikan Di Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar. Kemudian terkait dengan sumber daya finansial atau anggaran tidak ada pendaan terkait pembuatan aplikasi “SIAPkerja” karena berada di naungan Kemnaker dan sumber daya infrastruktur sangat memadai dalam penerapan pelayanan secara online. Selanjutnya yang ketiga pada Elemen

Value (manfaat) dinilai sudah cukup baik karena Masyarakat tidak harus datang lagi ke kantor dalam penyelesaian data dan itu tentunya akan menghemat mulai dari waktu, tenaga dan biaya.

Faktor penghambat dalam implementasi *e-government* melalui aplikasi “SIAPkerja” yaitu : a) jaringan tidak stabil, b) Masyarakat kurang memahami teknologi,.

B. Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan pada masing-masing kebijakan yang digunakan untuk mengukur sukses nya penerapan *e-government*, peneliti memberikan saran agar penerapan *e-government* menjadi lebih baik lagi:

1. Untuk mewujudkan *electronic government* yang berkualitas di Kabupaten Takalar tentu harus ada dukungan atau dorongan dari pemerintah minimal berupa adanya kebijakan yang dibuat. Jika tidak ada itu menghambat dalam proses penerapan.
2. Selain itu kapasitas dari kantor UPT BLK Kabupaten Takalar haruslah memadai misalnya seperti tersedianya fasilitas di BLK Kabupaten Takalar yang memadai dan tersedianya sumberdaya manusia atau oprator. Ketika itu tidak ada maka aplikasi “SIAPkerja” tidak bisa dilaksanakan
3. Hal penting selanjutnya yang menurut saya inti dari penerapan ini adalah adanya manfaat yang diberikan karena apa gunanya diterapkan ketika itu tidak ada manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Belai, S. imrev (2022) *Preparatory School. Student Learning Styls And Strategies In Learning Mathematics In Estie Woreda, South Gondar Zone, Amhara Regional State, Ethiopia*. Haramaya university.
- Berkat Anugrah Kurunia, S., Marzuki, M. and Affan, I. (2021) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran’, *Jurnal Ilmiah METADATA*, 14(1), pp. 1–13.
- Febiyanti, H.D.A.J. (2021) ‘Implementasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kelurahan Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Tahun 2021’, (63).
- Habibullah, A. (2010) ‘Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government’, 23(c), pp. 187–195.
- Indrajit, E. (2006) ‘Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi’, *E- Government*, p. 91.
- Lestari, R.A. and Santoso, A. (2022) ‘Pelayanan Publik Dalam Good Governance’, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), p. 43. Available at: <https://doi.org/10.30742/juispol.v2i1.2134>.
- Pananrangi, S., Bahri, A.R. and Syamsul (2021) *Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik*. Edited by H. Halim. Gowa: Pusaka Almailda.
- Perkasa, D.H. and Widodo, S.E. (2018) ‘the Evaluation of Technical Training Program for Career Development in Limited Company of Brantas Abipraya Jakarta’, *IJHCM (International Journal of Human Capital Management)*, 2(1), pp. 34–39. Available at: <https://doi.org/10.21009/ijhcm.021.05>.
- Solechan, S. (2019) ‘Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik’, *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), pp. 686–696.
- Suami, G., Gucialit, P. and Lumajang, K. (2016) ‘81818-ID-inovasi-pelayanan-publik-studi-pada-pela’, 2(4), pp. 156–161.
- Sugiyono (2019a) *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2019b) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wirawan, V. (2020) ‘Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era

- Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia', *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(1), pp. 1–16. Available at: <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>.
- Yulzain, F. and Jumiati, J. (2020) 'Efektivitas Uptd Balai Latihan Kerja (Blk) Dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Di Uptd Blk Kabupaten Padang Pariaman', *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), pp. 12–19. Available at: <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.37>.
- Belai, S. imrev (2022) *Preparatory School. Student Learning Styls And Strategies In Learning Mathematics In Estie Woreda, South Gondar Zone, Amhara Regional State, Ethiopia*. Haramaya university.
- Berkat Anugrah Kurunia, S., Marzuki, M. and Affan, I. (2021) 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran', *Jurnal Ilmiah METADATA*, 14(1), pp. 1–13.
- Febiyanti, H.D.A.J. (2021) 'Implementasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kelurahan Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Tahun 2021', (63).
- Habibullah, A. (2010) 'Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government', 23(c), pp. 187–195.
- Indrajit, E. (2006) 'Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi', *E- Government*, p. 91.
- Lestari, R.A. and Santoso, A. (2022) 'Pelayanan Publik Dalam Good Governance', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), p. 43. Available at: <https://doi.org/10.30742/juispol.v2i1.2134>.
- Pananrangi, S., Bahri, A.R. and Syamsul (2021) *Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik*. Edited by H. Halim. Gowa: Pusaka Almaida.
- Perkasa, D.H. and Widodo, S.E. (2018) 'the Evaluation of Technical Training Program for Career Development in Limited Company of Brantas Abipraya Jakarta', *IJHCM (International Journal of Human Capital Management)*, 2(1), pp. 34–39. Available at: <https://doi.org/10.21009/ijhcm.021.05>.
- Solechan, S. (2019) 'Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik', *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), pp. 686–696.
- Suami, G., Gucialit, P. and Lumajang, K. (2016) '81818-ID-inovasi-pelayanan-publik-studi-pada-pela', 2(4), pp. 156–161.
- Sugiyono (2019a) *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Sugiyono (2019b) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wirawan, V. (2020) 'Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia', *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(1), pp. 1–16. Available at: <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>.

Yulzain, F. and Jumiati, J. (2020) 'Efektivitas Uptd Balai Latihan Kerja (Blk) Dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Di Uptd Blk Kabupaten Padang Pariaman', *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), pp. 12–19. Available at: <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.37>.



LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. H. Padjonga Daeng Ngalle No.3 Kabupaten Takalar

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 070/261/BKBP/VI/2023

Berdasarkan Surat dari Plt Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 18958/S.01/PTSP/2023 Tanggal, 12 Juni 2023 perihal Izin Penelitian, Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar pada prinsipnya memberikan persetujuan, dan rekomendasi kepada :

| | |
|----------------------|---|
| Nama | : Akbar Maulana |
| Tempat Tanggal Lahir | : Takalar, 23 Oktober 2001 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pekerjaan/Lembaga | : Mahasiswa (S1)/UNISMUH Makassar |
| Alamat | : Kec Canrego, Kec Polombangkeng Selatan, Kab Takalar |
| Tempat Penelitian | : UPT Balai Latihan Kerja, Kec. Pattalassang Kab. Takalar |
| Waktu Pelaksanaan | : 14 Juni s/d 14 Agustus 2023 |

Untuk diterbitkan Izin Penelitian/Rekomendasi sesuai dengan Permendagri No. 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas Permendagri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Takalar, 23 Juni 2023
 an. Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial
 Budaya dan Agama,
 Tim Teknis


ISMAL, SE, M.SI
 Pangkat Pembina, IV/a
 NIP. 19720502 199402 1 004



2. Struktural Organisasi UPT BLK Kabupaten Takalar



3. Wawancara dengan Kepala UPT BLK Kabupaten Takalar



4. Wawancara dengan Kasubag TU UPT BLK Kabupaten Takalar



5. Wawancara dengan Bagian Pengadministrasian Umum



6. Wawancara dengan Peserta Pelatihan



7. Wawancara dengan peserta pelatihan



8. Ruangan Kejuruan Las



9. Ruangan kejuruan Otomotif





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Akbar Maulana
Nim : 105611102419
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1 | Bab 1 | 8 % | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 10 % | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 9 % | 10 % |
| 4 | Bab 4 | 5 % | 10 % |
| 5 | Bab 5 | 3 % | 5 % |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Agustus 2023

Maugetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursaman, S. Hum, M.L.P.
NBM 964.591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972, 881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Akbar Maulana 105611102419

ORIGINALITY REPORT

8% SIMILARITY INDEX
6% FROM INTERNET SOURCES
0% PUBLICATIONS
2% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | vdocuments.site Internet Source | 5% |
| 2 | bursakerja.banjarnegarakab.go.id Internet Source | 2% |
| 3 | Submitted to Sriwijaya University Student Paper | 2% |

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches 2%



BAB II Akbar Maulana 105611102419

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| Rank | Source | Similarity |
|------|---|------------|
| 1 | repository.unpas.ac.id Internet Source | 4% |
| 2 | Submitted to Politeknik STIA LAN Student Paper | 2% |
| 3 | jia.stialanbandung.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source | 2% |

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2.16

BAB III Akbar Maulana 105611102419

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 9% | 9% | 2% | 6% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|----|
| 1 | digilib.uinkhas.ac.id Internet Source | 5% |
| 2 | Submitted to Universitas Teknologi Petronas Student Paper | 4% |

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches



The image shows a Turnitin originality report for a document titled 'BAB III Akbar Maulana 105611102419'. The report indicates a total similarity index of 9%, which is composed of 9% from internet sources, 2% from publications, and 6% from student papers. Two primary sources are identified: 'digilib.uinkhas.ac.id' (Internet Source) contributing 5% and a 'Submitted to Universitas Teknologi Petronas' (Student Paper) contributing 4%. The report also includes settings for excluding quotes, bibliography, and matches, all of which are currently turned on. A large watermark of the Universitas Muhammadiyah Makassar logo is overlaid on the report, along with a 'LULUS' (Passed) seal from the university's library and a Turnitin logo.

BAB IV Akbar Maulana 105611102419

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

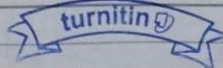
0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

5%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches



BAB V Akbar Maulana 105611102419

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX



0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

media.neliti.com
Internet Source

2%

2

repository.ar-raniry.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches On



RIWAYAT HIDUP



Akbar Maulana Lahir di Takalar pada Tanggal 23 Oktober 2001. Merupakan anak Pertama dari pasangan Bapak Supriadi dan Ibu Kamasiah. Penulis menempuh pendidikan di SDN No 134 Impres Su'rulangi pada Tahun 2007 sampai 2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama yaitu di SMPN 5 Takalar Tahun 2013 sampai 2016, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sekolah (SMA) di SMAN 3 Takalar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Studinya di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Prodi ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Muhammadiyah Makassar, selanjutnya penulis telah menyelesaikan sebuah tugas akhir sebagai seorang Mahasiswa dengan judul Implementasi *Electronic Government* "SIAPkerja" pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar.